

## PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Putri Bunga Melinda<sup>1</sup>, Ella Maglena<sup>2</sup>, Ani Faturrosidah<sup>3</sup>, Narita Dwi Kurnia Sari<sup>4</sup>, Rizal Ari Prasetyo<sup>5</sup>, Isna Himmatul A'la<sup>6</sup>, Nur Rahayu<sup>7</sup>, Alentino Qa'albinovel<sup>8</sup>, Alfia Tri Damayanti<sup>9</sup>, Galuh Bintang Maharani<sup>10</sup>, Rika Maya Sari<sup>11</sup>, Ardhana Januar Mahardhani<sup>12\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

e-mail korespondensi: ardhana@umpo.ac.id<sup>12\*</sup>

Dikirim : 29 Maret 2024, Direvisi : 14 April 2024, Diterima: 27 April 2024

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan yang dalam kegiatannya diawali dengan perencanaan yaitu koordinasi bersama antara mahasiswa, dosen pengampu, dan pihak sekolah. Setelah tahap perencanaan adalah tahap pelaksanaan yang menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada bagian akhir adalah evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner menggunakan isian google form. Kegiatan penyuluhan difokuskan pada pemahaman konsep korupsi dalam konteks layanan kesehatan, menyoroti dampak negatifnya terhadap pelayanan medis dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 November 2023 di SMK Kesehatan Bakti Medika Indonesia Ponorogo, sasaran dalam kegiatan ini sebanyak 30 siswa kelas kelas 10 dan 12. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini adalah 90% siswa telah paham apa itu korupsi, faktor yang menyebabkan korupsi, serta contoh korupsi.

**Kata kunci:** Pendidikan anti korupsi; penyuluhan; siswa

### ABSTRACT

This community service activity aims to raise awareness about the importance of corruption prevention for vocational high school students. The activity carried out is counseling which in its activities begins with planning, namely joint coordination between students, lecturers, and the school. After the planning stage is the implementation stage which uses lecture and discussion methods. At the end is an evaluation conducted through a questionnaire using google form. Counseling activities focused on understanding the concept of corruption in the context of health services, highlighting its negative impact on medical services and community welfare. This activity was carried out on November 8, 2023 at SMK Kesehatan Bakti Medika Indonesia Ponorogo, the target in this activity was 30 students of grades 10 and 12. The results of this counseling activity are 90% of students have understood what corruption is, the factors that cause corruption, and examples of corruption.

**Keywords:** Anti-Corruption Education; Conseling; Student

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian korupsi selalu berevolusi pada setiap era, peradaban, dan wilayah. Rumusan dari korupsi dapat berbeda tergantung pada pendekatan dan penekanan yang sedang digunakan, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum (Gunawan, 2018; Mahardhani, 2018). Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan (Herianto et al., 2022). Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*) (Rizhan, 2020). Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku "Arthashastra" yang membahas masalah korupsi di masa itu dalam literatur Islam (Rahmadhanti et al., 2023).

Robert Klitgaard, menyatakan pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpan dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi (Sudiran, 2017). Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara. Pengertian secara yuridis, baik dalam arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 3 Tahun 1971 (Fitriadi et al., 2023). Pemahaman tentang tindakan korupsi tersebut mendorong pengabdian untuk melakukan penyuluhan guna mencegah tindakan korupsi baik di kalangan masyarakat umum maupun negara. Upaya pencegahan permasalahan tersebut hendaknya dilakukan sejak dini dengan menguatkan tonggak kedaulatan negara, menanamkan rasa cinta tanah air dan menanamkan nilai-nilai luhur integritas, serta mengambil peran sebagai generasi muda yang akan menapaki tonggak tersebut menuju era baru perubahan dan bebas korupsi (Direktorat Sekolah Dasar, 2022; Labetubun et al., 2022). Korupsi yang kecil pada awalnya, dapat menjadi tindak pidana korupsi, karna telah merugikan banyak pihak sehingga sangat diperlukan pencegahan sejak dini. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan generasi muda, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan generasi muda tanah air, dan mencari solusi bersama untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masyarakat dan bangsa (Saputra, 2022).

Tindak pidana korupsi jika tidak diminimalisasi dengan penyuluhan antikorupsi kepada generasi muda, akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal tersebut (Umiyati et al., 2023). Sehingga peran generasi muda yang bersih dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran sangat diperlukan demi mewujudkan kesatuan NKRI antikorupsi (Syafaat, 2021). Dengan memanfaatkan jenjang pendidikan menengah yaitu SMK Kesehatan Bakti Medika Ponorogo, maka diharapkan tindakan ini dapat menguatkan fondasi pemikiran siswa SMK yang akan memasuki dunia kerja agar dapat memahami mengenai aktivitas korupsi dalam bidang kesehatan dan solusi atas penyelesaian kasus yang terjadi.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Aktivitas dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan diawali dengan perencanaan kegiatan yang telah tim pengabdian laksanakan bersama dengan dosen pengampu dan pihak sekolah. Setelah tahap perencanaan pada tahap pelaksanaan ini tim menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan sebuah materi (Mahardhani et al., 2022; Violyn et al., 2023), adapun materi dalam kegiatan ini adalah pendidikan anti korupsi dan pencegahannya dalam bidang kesehatan.

Selanjutnya pada tahap evaluasi kegiatan, tim menggunakan kuesioner kepada siswa melalui *google form*. Kuisisioner ini berisi tentang pemahaman siswa terhadap materi pendidikan antikorupsi di bidang kesehatan dan pencegahannya yang telah disampaikan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 30 siswa pada kelas 10 dan 12 SMK Bakti Indonesia Medika, Ponorogo, Jawa Timur yang terdiri dari tiga jurusan meliputi jurusan asisten keperawatan, teknik laboratorium medik, dan farmasi klinis komunitas. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pendidikan budaya antikorupsi ini dilakukan pada 8 November 2023 dengan jadwal seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penyuluhan

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	07.00 – 08.00	Persiapan	Seluruh panitia
2.	08.00 – 08.15	Registrasi Peserta	Seluruh panitia
3.	08.15 – 08.30	Pembukaan kegiatan	Ella Maglena
4.	08.30 – 09.15	Penyampaian Materi Penyuluhan dan memberikan informasi mengenai anti korupsi di bidang kesehatan	Nur Rahayu dan Alentio Qa'albinovel
5.	09.15 – 09.45	Tanya jawab dan diskusi kegiatan	Seluruh panitia
6.	09.45 – 10.00	Penutup	Seluruh panitia

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dari program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini merupakan usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada pembelajaran di mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Kegiatan ini juga sebagai upaya pencegahan dan pembentukan karakter anti korupsi untuk generasi muda tenaga kesehatan yang baik.

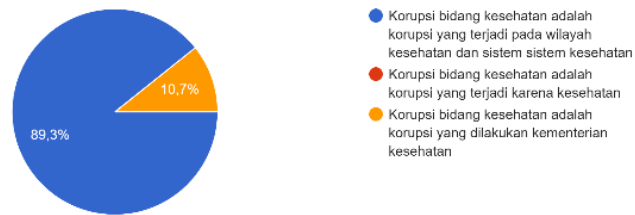
Indikator hasil kegiatan penyuluhan budaya anti korupsi tersebut dapat di nilai dari beberapa aspek kelancaran dalam penyampaian dan pemahaman siswa serta terkoordinirnya kegiatan acara sesuai dengan standar acara penyuluhan yang telah disusun. Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan diketahui bahwa siswa dapat memahami seluruh materi yang telah di sampaikan secara sistematis menggunakan *power point* dan *audio visual* dengan proyektor. Untuk mengetahui tingkat pemahaman selanjutnya dilakukan pengisian kuisisioner yang dibuat melalui *googleform* dan dibagikan langsung kepada siswa melalui *whatsapp*. Setelah itu para peserta diberikan waktu untuk mengisi kuisisioner tersebut dengan benar. Dari penilaian ini dapat membuat kesimpulan tentang seberapa paham dan mengerti siswa siswi tersebut akan materi penyuluhan yang telah disampaikan.



Gambar 1. Pemaparan materi tentang pendidikan anti korupsi (kiri) Sesi foto bersama dengan peserta (kanan)

Indikator keberhasilan pengisian kuisisioner dapat sebagai berikut:

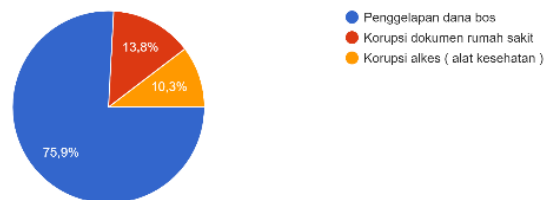
Apa itu korupsi dibidang kesehatan ?  
28 jawaban



Gambar 2. Pertanyaan butir 1

Hasil diagram pertanyaan ke-1, 89,3% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang apa itu korupsi di bidang kesehatan. Sebanyak 10,7% siswa menjawab salah atau kurang memahami tentang pengertian korupsi. Penyuluhan yang kami adakan pada siswa SMK Kesehatan Banti Indonesia Medika Ponorogo mengakibatkan mereka mampu menjelaskan dan menjawab soal tersebut, memastikan bahwa penyuluhan 90% berhasil memberikan pengetahuan dan informasi tentang soal ke-1."

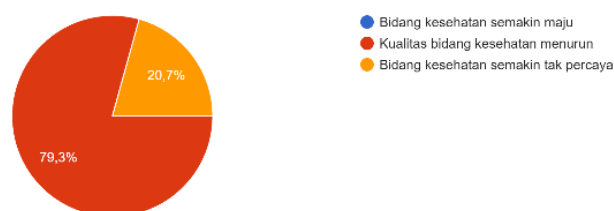
Apa saja jenis korupsi dibidang kesehatan, kecuali ?  
29 jawaban



Gambar 3. Pertanyaan butir 2

Hasil diagram pertanyaan ke-2, 75,9% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang yang bukan salah satu jenis-jenis korupsi di bidang kesehatan. Sebanyak 13,8% pada opsi pilihan B siswa memberikan jawaban salah, dan 10,2% opsi pilihan A siswa juga menjawab salah. Maka dari itu 80% siswa dapat menyebutkan jenis jenis korupsi dan 20% siswa belum mengerti tentang jenis jenis korupsi pada pertanyaan ke 2. Melalui penyuluhan tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada Sebagian 80% siswa Smk bimpo untuk menyebutkan yang bukan jenis korupsi di bidang kesehatan tentang soal ke-2."

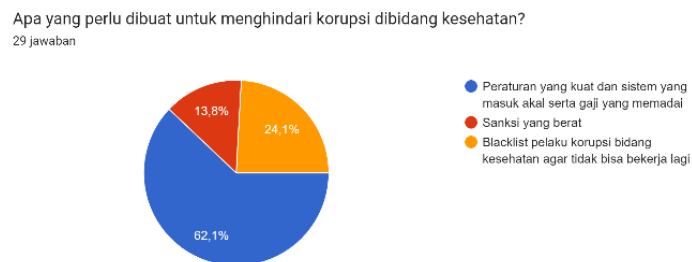
Apa dampak korupsi bidang kesehatan?  
29 jawaban



Gambar 4. Pertanyaan butir 3

Hasil diagram pertanyaan ke-3, 79,3% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi B yaitu apabila adanya korupsi di bidang

Kesehatan akan berdampak pada penurunan kualitas bidang Kesehatan dan 20,7% pada opsi c siswa menjawab salah terkait pertanyaan ke 3 tentang apa dampak korupsi 80% siswa dapat memahami pertanyaan ke 3.



Gambar 5. Pertanyaan butir 4

Hasil diagram pertanyaan ke-4, 62,1% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi A pada opsi B dan 13,8 % dan opsi C 24,1% yang menjawab salah maka dari itu 65% siswa dapat menjelaskan tentang soal yang ke 4 dan 35% belum dapat memahami soal pada pertanyaan ke 4.



Gambar 6. Pertanyaan butir 5

Hasil diagram pertanyaan ke-5, 96,6 % dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah melakukan korupsi di bidang Kesehatan yang berupa korupsi jamkes.dan hanya 4% siswa belum dapat mengetahui berita korupsi yang dilakukan oleh gubernur provinsi banten tersebut.

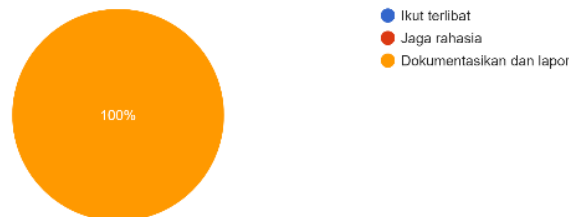


Gambar 7. Pertanyaan butir 6

Hasil diagram pertanyaan ke-6, 86,2 % dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab salah atas pertanyaan bagaimana Langkah mengembalikan kepercayaan Masyarakat di bidang Kesehatan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan karena dengan itu Masyarakat dapat Kembali percaya pada aspek instansi Kesehatan yang

sudah membuat kesalahan fatal dan 13.8% siswa belum dapat memahami Langkah yang dilakukan agar Masyarakat Kembali percaya kepada instansi Kesehatan yang sudah mengecewakan,

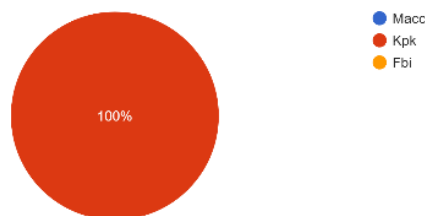
Apa yang anda lakukan jika secara tak sengaja melihat tindakan korupsi?  
29 jawaban



Gambar 8. Pertanyaan butir 7

Hasil diagram pertanyaan ke-7, 100% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi c maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah dapat memahami pertanyaan apabila mereka melihat Tindakan korupsi apa yang dilakukan yaitu dengan Mendokumentasikan dan Melaporkan.

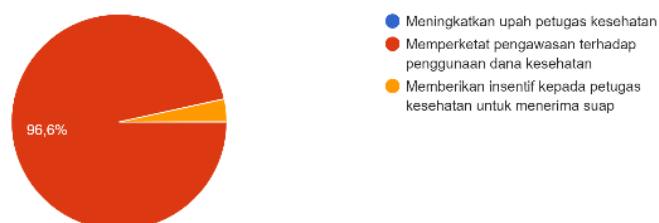
Lembaga indonesia yang memiliki wewenang memberantas korupsi di semua bidang ?  
29 jawaban



Gambar 9. Pertanyaan butir 8

Hasil diagram pertanyaan ke-8, 100% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah dapat memahami pertanyaan Lembaga Indonesia yang memiliki wewenang memberantas korupsi di semua bidang adalah KPK

Bagaimana pencegahan korupsi di bidang kesehatan dapat dilakukan?  
29 jawaban



Gambar 10. Pertanyaan butir 9

Hasil diagram pertanyaan ke-9, 96.6% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah dapat memahami pertanyaan tentang bagaimana pencegahan korupsi di bidang Kesehatan dapat dilakukan yaitu dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana kesehatan. Maka dari itu penyuluhan 90% dapat memberikan informasi tentang pertanyaan ke 9 dan membuat siswa dapat menjelaskan bagaimana pencegahan korupsi di bidang Kesehatan tersebut.

Apa yang bisa dilakukan individu untuk mendukung pencegahan korupsi dibidang kesehatan?  
29 jawaban



Gambar 11. Pertanyaan butir 10

Hasil diagram pertanyaan ke-10 diketahui bahwa 96.6% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah dapat memahami pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan individu untuk mendukung pencegahan korupsi di bidang kesehatan yaitu dengan cara berperan sebagai pelapor Ketika menemui Tindakan korupsi.

Dari kuisisioner yang telah di isi oleh 30 peserta penyuluhan menunjukkan bahwa para siswa telah mampu dan dapat dan memahami tentang materi yang telah di sampaikan. Ini terbukti dari hasil diagram kuisisioner yang menunjukkan pada angka 90% siswa yang memahami. Pelaksanaan penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa para siswa mampu menangkap dan mengerti atas informasi pada penyuluhan ini dan alhamdulillah memperoleh respon terbaik.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan penyuluhan pendidikan antikorupsi di SMK Bakti Indonesia Medika adalah berhasil, siswa dapat memahami dari apa yang sudah disampaikan selama kegiatan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari indikator hasil kuesioner yang menunjukkan angka 90% siswa yang paham dan menjawab dengan benar dari soal yang diberikan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan praktikum mata kuliah penyuluhan pendidikan antikorupsi pada semester ganjil 2023/2024.

#### REFERENSI

- Direktorat Sekolah Dasar. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi*. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/pendidikan-anti-korupsi>
- Fitriadi, Asra, D., Krismen, R., & Yudi. (2023). *Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Gunawan, G. (2018). *Wacana Tafsir tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Korupsi (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Herianto, E., Indriyani, D., Komalasari, K., Malihah, E., Fitriasari, S., Zuriah, N., Rochmadi, N. W., Setyowati, R., Mahardhani, A. J., Indarwati, I., Sulton, S., & Cahyono, H. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Digital (Vol. 1)*. Widina Bhakti Persada.
- Labetubun, M. A., Sumarezs, T. J. A., Mardiana, M., Ramadhan, M. S., Holle, E. S., Simbolon, N. Y., Primawati, N. H., Rahman, A., Pidada, I., Jahri, M., & Mahardhani, A. J. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan (Sebagai Penguat Karakter Bangsa)*. Widina Bhakti Persada.

- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media.
- Mahardhani, A. J., Wulansari, B. Y., & Ruhardi, R. (2022). Penguatan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan Melalui Metode Inseri Untuk Guru PAUD Di Kabupaten Wonogiri. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 5(1), 61–66. <https://doi.org/10.33330/JURDIMAS.V5I1.1208>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rahmadhanti, N., Nadira, D., Munawarrah, M., Nasution, A. R., & Anwar, K. (2023). Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam. *Journal of Student Research*, 1(5), 319–324. <https://doi.org/10.55606/JSR.V1I5.1739>
- Rizhan, A. (2020). Law Enforcemenet Korupsi Ditinjau dari Teori Progresif, Responsif, dan Represif. *Kodifikasi*, 2(2), 118–132.
- Saputra, I. K. A. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 82–93.
- Sudiran, F. (2017). Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.31293/LG.V2I1.2847>
- Syafaat, S. M. (2021). Pembentukan Karakter Religius Pada Anak Usia Dini Studi Pada RA Al Wafa Desa Ambulu Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.36668/JAL.V10I2.275>
- Umiyati, H., Anwar, K., Putra, A., Amane, O., Sipayung, B., Liano Hutasoit, W., Rijal, K., Yunus, R., Wiwin, K., Wismayanti, D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, E., & Sudarmanto, E. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*. Widina.
- Violyn, C. M. M., Desyana, A. F., Mahendra, J. W., Argono, Z. B. B., Aprilia, V. A., Nurlitasari, A., Maharani, D., Nusaibah, K. A., Meytasharoh, V. P., Anisa, C. A. N., & Mahardhani, A. J. (2023). Pelaksanaan Focus Group Discussion untuk Penyiapan Materi Relationship and Sex Education pada Pelaksanaan Sekolah Perempuan. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 594–600. <https://doi.org/10.35870/JPNI.V4I3.456>